

TESIS

**TANGGUNG JAWAB DOKTER DENGAN ADANYA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN**



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

NAMA : YULIA SUSANTI

NIM : 2320113020

Pembimbing :

PROF. DR. BUSYRA AZHERI, S. H., M. HUM

Dr. YUSSY A MANNAS, S. H., M. H

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

**TANGGUNG JAWAB DOKTER DENGAN ADANYA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN**

(Yulia Susanti, 2320113020, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 219 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Penerbitan surat keterangan sehat merupakan salah satu persyaratan administratif yang umum diberlakukan oleh perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Namun, praktik penerbitan surat keterangan sehat oleh dokter di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sering kali dilakukan melalui pemeriksaan yang singkat dan tidak komprehensif, sehingga menimbulkan persoalan mengenai akurasi, legalitas, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum serta etika kedokteran. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan etika kedokteran; dan (3) Analisis praktik penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan observasi terhadap praktik pemeriksaan kesehatan di empat fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum administrasi, perdata, dan pidana karena seluruh dokter yang menerbitkan surat keterangan sehat memiliki STR dan SIP yang sah serta tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum. Namun, dari perspektif etika kedokteran, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban etik sebagaimana diatur dalam KODEKI dan Sumpah Dokter Indonesia, terutama terkait asas kejujuran, independensi, dan perlindungan rahasia medis. Penelitian juga menemukan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan masih singkat, dangkal, dan belum mencakup pemeriksaan fisik, mental, dan sosial sebagaimana definisi sehat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang diteliti tidak memiliki SOP terkait penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan variasi prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Dokter, Surat Keterangan Sehat, Melanjutkan Pendidikan

**DOCTOR'S RESPONSIBILITY WITH THE PRESENCE OF
ISSUANCE OF HEALTH CERTIFICATE
TO CONTINUE EDUCATION**

*(Yulia Susanti, 2320113020, Master of Law, Faculty of Law,
Andalas University, 219 pages, 2026)*

ABSTRACT

The issuance of a health certificate is one of the administrative requirements commonly imposed by universities for prospective new students. However, the practice of issuing health certificates by doctors in various health care facilities is often carried out through short and non-comprehensive examinations, raising questions about its accuracy, legality, and conformity with legal provisions and medical ethics. This condition is the background of this research. This study aims to analyze: (1) The responsibility of doctors in the issuance of health certificates to continue education based on laws and regulations; (2) The responsibility of doctors in the issuance of health certificates to continue education based on medical ethics; and (3) Analysis of the practice of issuing health certificates to continue education in health service facilities based on the provisions of laws and regulations and medical ethics. This study uses an empirical juridical method through interviews and observations of health examination practices in four health care facilities. The results of the study show that the responsibility of doctors in issuing health certificates to continue education in general is in accordance with the provisions of administrative, civil, and criminal law because all doctors who issue health certificates have valid STR and SIP and no unlawful acts were found. However, from the perspective of medical ethics, the practice has not fully fulfilled the ethical obligations as stipulated in the KODEKI and the Indonesian Doctors' Oath, especially related to the principles of honesty, independence, and protection of medical secrets. The research also found that the health checks carried out are still short, superficial, and do not include physical, mental, and social examinations as defined in Law Number 17 of 2023. In addition, all health service facilities studied do not have SOP related to the issuance of health certificates to continue education, so it has the potential to cause variations in procedures in the implementation of services.

Keywords : *Responsibility, Doctor, Health Certificate, Continuing Education*